



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH TENGAH

NOMOR 188.4/ 13 /DPRK/2017

TENTANG


PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2017

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislatif;
  - b. bahwa untuk menjalankan fungsi legislatif diperlukan suatu perencanaan pembentukan qanun yang disusun secara terpadu, sistematis dan partisipatif yang diwujudkan dalam suatu program legislatif Kabupaten;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan qanun, maka perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kabupaten Aceh Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

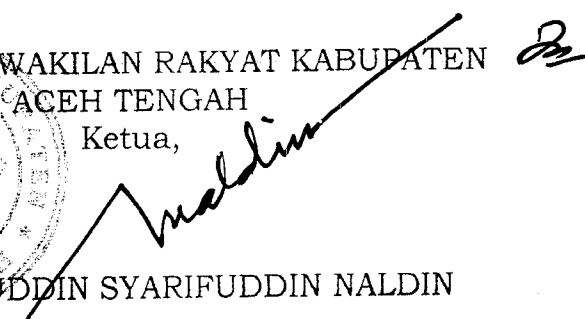
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH PRIORITAS TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Prioritas tahun 2017 yang berisi 19 (sembilan belas) rancangan qanun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan masih terdapat rancangan qanun yang penting dan mendesak untuk dibahas, maka selain Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Prioritas Tahun 2017 yang telah ditetapkan pada diktum kesatu dapat dilakukan pembahasan dengan menganut azas kumulatif terbuka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 28 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH  
Ketua,  
  
ANSARUDDIN SYARIFUDDIN NALDIN

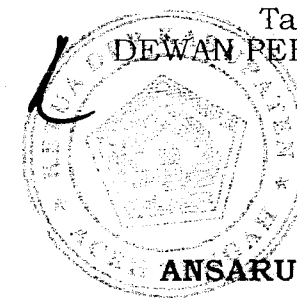
Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon

No	Qanun Tentang	Materi Pokok Tentang	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Instansi Pengusul	Keterangan
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	√	-	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	Rancangan
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan Nomenklatur, perubahan wewenang dan mekanisme-mekanisme barang milik daerah	√	-	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Rancangan
3	Penyelenggaraan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tertib Lingkungan Hidup, tertib lingkungan masyarakat, tertib fasilitas umum, tertib usaha, tertib pemeliharaan hewan, tertib bangunan gedung, tertib penyelenggaraan alat peraga, tertib sosial, tertib, kesehatan, tertib kawasan tanpa rokok dan terbatas rokok	-	√	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Satpol PP, WH dan Linmas	Satpol PP, WH dan Linmas	Pra Rancangan
4	Garis Sepadan	Batas-batas dibolehkan didirikan bangunan	√	-	PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rancangan
5	Majelis Adat Gayo	-Tata cara pemilihan anggota -Unsur-unsur yang mendaftar sebagai anggota -Masa jabatan	-	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Pada Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh	Sekretariat Majelis Adat Gayo	Sekretariat Majelis Adat Gayo	Pra Rancangan

6	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame	√		Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Rancangan
7	Retribusi Daerah	Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek	√	-	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Retribusi Daerah dan Tindak lanjut keputusan Mendagri Nomor 188.34-9144 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah	SKPK Dalam Kabupaten Aceh Tengah	SKPK Dalam Kabupaten Aceh Tengah	Pra Rancangan
8	Qanun Pariwisata	Pengelolaan Pariwisata, Penataan Objek Pariwisata	√	-	Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah	Usul Eksekutif	Pra Rancangan
9	Alih Fungsi Lahan	Pengaturan Tata Guna Lahan	√	-	PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Alih Fungsi Lahan	Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah	Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah	Pra Rancangan
10	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	Penyesuaian Objek Pajak	-	√	undang-undang nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tindak lanjut Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8954 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Pra Rancangan
11	Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung	Penyesuaian dengan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	-	√	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPMK, Bagian Tapem dan Bagian Hukum	DPMK	Pra Rancangan
12	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	√	-	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Hewan dan kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Dinkes	Dinas Perikanan	Pra Rancangan
13	Pengelolaan Ternak Daerah	Pengelolaan Dan Pengawasan Ternak	√	-	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Dinkes	Dinas Perikanan	Pra Rancangan
14	Izin Gangguan (HO)	Peraturan dan Penataan Tempat Usaha	√	-	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Pra Rancangan

15	Pengelola dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	-Pengusahaan/Penggunaan SDA -Wewenang Pemberian Izin -Tatacara dan Persyaratan Izin -Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan Izin -Hak dan Kewajiban Pemegang Izin -Pengawasan Izin	√	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pra Rancangan
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	- Fungsi Dan Klasifikasi bangunan gedung - Persyaratan pemohon - Tatacara pengelolaan IMB - Dokumen IMB	√	-	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Izin Mendirikan Bangunan	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Perumahan dan Permukiman	Pra Rancangan
17	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah	- Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRK	-	√	Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	DPRK Aceh Tengah	Usul Inisiatif DPRK Aceh Tengah	Rancangan
18	Qanun Mata Pelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat Dan Seni Budaya Sebagai Muatan Lokal Di Sekolah	Mata Pelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat Dan Seni Budaya Sebagai Muatan Lokal Di Sekolah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah	Usul Inisiatif DPRK Aceh Tengah	Rancangan
19	Qanun Kopi	-Pengelolaan, Perlindungan dan penguatan petani Kopi	√	-	Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	DPRK Aceh Tengah	Usul Inisiatif DPRK Aceh Tengah	Pra Rancangan



Takengon, 28 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH  
Ketua

**ANSARUDDIN SYARIFUDDIN NALDIN**